

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama hampir lima tahun ini, masyarakat Indonesia belum percaya dengan adanya keberhasilan SBY-JK dalam memberantas korupsi. Hal ini karena banyaknya kasus korupsi besar yang nilainya triliun, tidak jelas sampai dimana diusutnya. Ditambah lagi dengan kesan "tebang pilih" untuk memberantas korupsi yang dilakukan SBY-JK. Terbukti juga berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh beberapa peneliti, rata-rata hasilnya menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan SBY-JK menurun.

Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa kepercayaan publik atas pemberantasan korupsi cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dengan adanya indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun ini menurun dari 2,4 pada 2006 menjadi 2,3 tahun ini (<http://investigasi-korupsi.com/index.php/Berita/Persepsi-Publik-Soal-Pemberantasan-Korupsi-Menurun.html>, diakses 7 mei 2008).

Dari hasil laporan Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yaitu penilaian atas satu tahun

... dari pemerintahan SBY-JK di bidang pemberantasan korupsi

janji-janji pemberantasan korupsi SBY-JK yang dikaji secara analitis berdasarkan apa yang terjadi di lapangan selama satu tahun pertama, yakni 20 Oktober 2004-20 Oktober 2005) dalam kenyataannya tidak berhasil (Hargens, 2007:29). Hal ini dikarenakan untuk memperkuat janji-janji yang diucapkan pada tanggal 20 Oktober tersebut, SBY sering melontarkan komitmen-komitmen baik yang bersifat general maupun spesifik dalam rangka pemberantasan korupsi. Namun pada kenyataannya dari komitmen yang telah disebutkan SBY tersebut, tidak ada kasus korupsi satupun yang berhasil dituntaskan ditahun pertama pemerintahan SBY-JK.

Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan TimTas Tipikor dalam pemerintahan SBY-JK untuk memberantas korupsi ini justru tidak efektif bahkan berlebihan karena menyebabkan fungsi yang saling tumpang tindih. Dalam hal ini adalah keuangan negara akan semakin terbebani untuk pembiayaan kedua instansi tersebut. Karena dari hasil kerja KPK maupun TimTas Tipikor belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kenyataannya tidak berhasil menangani korupsi politik dalam skala besar. Saperti yang dikutip dari www.komisiyudisial.go.id, bahwasannya penilaian yang diberikan oleh *Indonesian Corruption Watch*, atau yang disebut dengan ICW,

tentang tiga tahun kinerja KPK yang menjadi andalan pemerintahan

SBY-JK. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kecilnya pengembalian dana hasil korupsi yang disetorkan ke kas negara. Fakta tersebut, tertuang dalam Laporan Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004-2007 yang dikeluarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (<http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=844&itemid>, diakses tanggal 7 Mei 2008).

Korupsi adalah sebuah kejahatan yang merugikan orang lain. Korupsi-korupsi Negara harus segera diberantas jika tidak ingin rakyatnya sengsara dan menderita. Korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi sistemik dan mendarah daging. Pejabat-pejabat yang tergiur akan uang rakyat, yang membuat mereka kaya, akan menjadikan *boomerang* untuk rakyatnya. Ketidakadilan disini begitu terlihat. Banyaknya rakyat yang menderita karena koruptor-koruptor yang tega merampas hak rakyat.

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan koruptor. Dari koruptor yang kelas *teri*, sampai koruptor kelas *kakap*. Kekayaan koruptor menjadikan indonesia juga kaya akan kemiskinan, kebodohan, keserakahan, kesombongan, kemunafikan, penderitaan dan ketidakadilan. Pada dasarnya pejabat tersebut koruptor atau tidak kita bisa menduganya dari kekayaan yang dia miliki. Bila kekayaan yang dimilikinya tidak wajar, artinya tidak sesuai dengan gaji dia sebagai pejabat, maka itu patut untuk diawasi. Hal ini bisa kita lihat pada

groups.yahoo.com, bahwasannya "Sikap yang ditunggu publik adalah memeriksa semua pejabat negara atau pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Periksa rekeningnya atau cek kepantasannya memiliki harta benda berlebihan. Misalnya, sekuat-kuatnya bupati, mana bisa dia memiliki tiga mobil *sport luks* dan rumah mirip vila di Pondok Indah. Atau seorang gubernur, sekuat-kuatnya dia, mana bisa mempunyai heli atau pesawat pribadi dan rumah *superluks*? Atau anggota DPR yang awalnya sederhana, bagaimana bisa tiba-tiba mempunyai lima rumah mewah. Atau seorang perwira tinggi polisi, sekuat-kuatnya jabatan polisi itu, kok bisa mempunyai 10 rumah di Kebayoran Baru" (<http://groups.yahoo.com/group/ambon/messages/43849?xm=1&m=e&l=1>, diakses tanggal 8 Mei 2008).

Penjahat-penjahat tersebut harus segera diadili, agar tidak semakin merajalela. Pemerintahan SBY-JK, memiliki kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan pemberantasan korupsi tersebut, meskipun tidak ditangani langsung oleh SBY dan JK sendiri tetapi ditangani oleh KPK, walaupun demikian pasti tetap mempengaruhi kredibilitas SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Kredibilitas adalah sesuatu yang sangat berharga. Sekali kredibilitas telah hilang, akan sangat sulit untuk bisa diperoleh kembali. Tanpa kredibilitas, adalah mustahil untuk memelihara suatu sukses. Perhatikan saja dalam lingkungan yang penuh ketidakpercayaan dan prasangka hanya

sedikit yang bisa dicapai seseorang. Janji dan komitmen bukan sekedar alat. Jauh lebih penting lagi, keduanya adalah apa yang kita perlukan untuk membangun ataupun menghancurkan kredibilitas. Oleh karena itu, kita harus memilih komitmen apa yang mampu kita berikan, dan janji apa yang mampu kita tepati (<http://indonesia.heartnsouls.com/cerita/b/c192.shtml>, tanggal, 23 September 2007).

Kredibilitas SBY-JK tergantung pada segi bagaimana pemerintahan SBY-JK menangani berbagai kebijakan-kebijakan (*policy*) dari SBY-JK dan faktor ekonomi dunia. Suara Karya, rabu, 8 agustus 2007, menyebutkan bahwa, Gejolak di sektor finansial global sekarang ini menjadi pertarungan pemerintah. Jika sektor keuangan di dalam negeri terpuruk akibat imbasan faktor global, kredibilitas pemerintahan SBY pun jadi terkikis. Hal Itu, pada gilirannya, berdampak kian mempersulit pekerjaan pemerintah di bidang ekonomi karena tahun depan atmosfer politik justru kian mengusik seiring perhelatan pemilu yang kian mendekat (<http://www.mail-archive.com/cikeas@yahoogroups.com/msg03678.html>, diakses tanggal 31, Juli 2007)

Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa

Dengan demikian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa (Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001). KPK dalam hal ini membantu pemerintah dalam memberantas korupsi. Pada dasarnya keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi dapat dilihat bahwa KPK dan pemerintah disini sudah bisa dikatakan cukup berhasil dalam memberantas korupsi yang dilakukan koruptor-koruptor kelas bawah yaitu yang nilainya kecil. Tetapi untuk yang nilainya diatas triliunan, SBY-JK belum berani mengambil tindakan. Padahal justru yang merugikan rakyat banyak adalah dari koruptor-koruptor kelas *kakap*. Kurang beraninya SBY-JK dalam menangani kasus-kasus korupsi besar sekarang ini, muncul berbagai opini, terutama dikalangan aktifis politik. Opini-opini tersebut yang nantinya akan menjadikan pemicu bagi SBY-JK untuk segera melakukan tindakan yang dapat memberi keadilan bagi semua pihak.

Korupsi itu sangat erat hubungannya dengan moral. Pejabat yang mempunyai moral yang baik tentu saja dia tidak mungkin melakukan tindakan korupsi. Jika semakin banyak tindak pidana korupsi pada kalangan pejabat dan elit pemerintah di Indonesia, itu sama saja artinya dengan moral pejabat di Indonesia sebagian besar masih buruk. Keberadaan koruptor-koruptor di Indonesia membuat masyarakat Indonesia resah, dan harus diberantas. Dengan adanya kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan SBY-JK yang tidak

berhasil dalam menangani kasus-kasus korupsi yang bernilai triliun, maka keberhasilan yang signifikan untuk negara juga tidak ada. Hal ini menimbulkan berbagai opini publik dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi tersebut, yang berpengaruh pada kredibilitas SBY-JK.

Opini Publik tentang pemberantasan korupsi, mempengaruhi kredibilitas SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Hal itu akan sangat berdampak pada kepuasan rakyat Indonesia terhadap kinerja SBY-JK. Sehingga ditahun 2009 nanti, rakyat bisa memiliki indikator-indikator untuk memilih presiden dan wakil presiden yang berkredibel, bersih dari KKN, memiliki program-program dan pemikiran yang mengutamakan kepentingan rakyat, terutama melakukan pemberantasan korupsi benar-benar sampai akar-akarnya, agar masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Untuk melakukan pemberantasan korupsi, sama halnya dengan membersihkan rumah, yakni dari yang paling dalam, kemudian yang paling luar. Jadi, yang harus diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang akarnya paling dalam yaitu yang paling tinggi nilainya, kemudian baru luarnya yaitu yang nilainya paling sedikit. Karena kalau akarnya saja belum dibersihkan, pasti akan tumbuh terus, karena kurang adanya penegakan hukum yang kuat. Prof Dr Achmad Ali SH MH dalam suaramerdeka.com mengatakan bahwa sudah menjadi rumus universal bahwa semakin tinggi harapan terhadap sesuatu akan semakin besarlah

kekecewaan yang bakal muncul jika harapan itu ternyata tidak terpenuhi. Demikianlah yang terjadi terhadap harapan yang terlalu tinggi terhadap penguatan dan peningkatan penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi di pemerintahan SBY/JK. (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/28/nas04.htm>, diakses tanggal 7 Mei 2008). Tingginya harapan masyarakat itu tidak lain diakibatkan oleh janji-janji kampanye SBY-JK yang terlalu besar untuk memberantas korupsi. Bahkan rakyat Indonesia belum lupa bahwa SBY berkali-kali menyatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi jika terpilih menjadi Presiden RI. Walaupun makna memimpin sendiri dalam pemberantasan korupsi itu kemudian dipertanyakan oleh beberapa tokoh dan pakar pemerhati masalah korupsi, dimana pada awalnya semua rakyat menganggap telah tibalah suatu era perubahan dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini sangat mempengaruhi kredibilitas SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden, terutama dalam opini publik. Maka dalam melakukan kebijakan pemberantasan korupsi, sebaiknya pemerintahan SBY-JK, harus melakukan minimal tiga hal untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi, seperti yang dikutip dari harianjoglosemar.com, bahwasannya "Pertama, harus ada sangsi atau hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan korupsi. Misalnya di hukum seumur hidup dan di hukum mati seperti yang diterangkan di

Cina. Kedua, menegakkan supremasi hukum dan reformasi UU Peradilan. Ketiga, orang-orang yang ada di kejaksaan, kehakiman, dan di Polri harus berasal dari orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk memberantas korupsi dengan kualifikasi bersih dari KKN. Sehebat apapun sistem yang dibangun oleh pemerintah sementara aktor-aktor penegak hukumnya masih korup akan sangat sulit untuk memberantas korupsi. Jika seluruh komponen dan aktor-aktor di atas bersatu dengan komitmen yang sama, upaya pemberantasan korupsi ini akan berhasil (http://harianjoglosemar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5700&Itemid=1, diakses 7 Mei 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut : Bagaimana Opini Aktifis Politik Terhadap Kredibilitas SBY-JK tentang Kebijakan Pemberantasan Korupsi?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar bermanfaat khususnya bagi Ilmu Komunikasi, sebagai referensi yang memaparkan pembahasan hasil hasil penelitian

ilmu sosial dan sebagai manifestasi atau penerapan teori yang telah diperoleh selama penulis mengikuti kuliah.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan dapat dijadikan pedoman bagi pengembangan penelitian ilmu komunikasi serta masukan dalam evaluasi tentang komunikasi politik terutama opini publik. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk mengetahui Bagaimana Opini Aktifis Politik Terhadap Kredibilitas Presiden dan Wakil Presiden tentang Kebijakan-kebijakannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara rinci tentang :

Opini Aktifis Politik Terhadap Kredibilitas SBY-JK tentang Kebijakan Pemberantasan Korupsi.

E. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini penulis menggunakan teori tentang Opini Publik, Kredibilitas dan

E.1. Opini Publik

Opini Publik berkaitan dengan komunikasi politik, karena bahwasannya opini publik merupakan kajian dari komunikasi politik. Opini publik selalu berkutat tentang masalah-masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini membahas tentang opini aktifis politik, dimana aktifis politik ada didalam publik politik.

Untuk mengetahui pengertian opini Publik, ada baiknya kita mengetahui tentang komunikasi politik. Menurut Sumarno, A.P., Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada suatu pengaruh yang sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas dalam kegiatan komunikasi akan dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi, dimana sanksi tersebut ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Sumarno, 1989: 9).

Politik sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Komunikasi dalam politik adalah kegiatan-kegiatan komunikasi yang ada dalam kegiatan politik. Kegiatan komunikasi politik erat kaitannya dengan apa yang disebut opini public. Opini public yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana antara publik dan elit politik dalam kegiatan komunikasi politik. Dimana opini public erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka dalam hal ini public bisa disebut komunikator ketika public tersebut menyampaikan pesan-pesannya dalam bentuk opini. Kemudian elit politik atau pemerintah

tersebut. Jika terjadi *feedback* maka fungsi komunikan dan komunikator itu bisa berubah. Dalam hal ini, komunikan bisa menjadi komunikator ketika memberikan umpan balik pada komunikator.

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana opini aktifis politik tentang kebijakan pemerintah. Aktifis politik dalam hal ini adalah orang-orang yang aktif dalam bidang politik dan tertarik untuk membicarakan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan rakyat. Opini aktifis tersebut merupakan kegiatan dari komunikasi politik. Pada dasarnya untuk dapat memahami pengertian komunikasi politik, kita harus dapat mengetahui pengertian dari "komunikasi" dan "politik", baik secara teori maupun penerapannya.

Kata Komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* yang kemudian dalam bahasa Inggris berbunyi *common* berarti menjadikan sesuatu (dalam hal ini pesan ataupun informasi) sebagai pengetahuan atau pengertian bersama. Dalam menjalin komunikasi tentu kita merasa berbicara dengan seseorang. Dengan bicara dengan seseorang tersebut, kita tentu merasa adanya kebersamaan yang terjalin didalamnya. Kebersamaan tersebut dijalin atas dasar tujuan yang sama yaitu melakukan komunikasi dengan topik pembicaraan yang sama.

Seperti kata Zulkarmein Nasution, bahwasannya ketika terjadi komunikasi, pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menegakkan "kebersamaan" dengan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut

(Nasution, 1990: 41). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan

kebersamaan tidak mungkin bisa dipisahkan. Begitu pula dengan opini publik dengan isu tertentu, merupakan hal yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Seperti opini publik yang mempunyai tujuan tertentu, maka komunikasi juga mempunyai tujuan, seperti yang dikatakan oleh Carl I. Hovland, batasan atau tujuan komunikasi adalah "proses untuk membentuk atau mengubah perilaku orang lain". Sedangkan menurut Harold D. Lasswell, komunikasi adalah "proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (*Who says what, in which channel, to whom, with, what effect*)" (Nimmo, 2000:13).

Ketika kita mendengar politik yang ada dalam benak kita pasti tidak jauh dari negara, pemerintah, kebijakan, masyarakat, kekuasaan. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, hal-hal tersebut sesungguhnya adalah saling terkait. Seperti kata politik berasal dari kata "*polis*" yang berarti "negara kota", kemudian berkembang menjadi "*politikos*" yang berarti kewarganegaraan. Dari kata *politikos* tersebut, kemudian berubah menjadi *politera* yang berarti hak-hak kewarganegaraan. Seperti menurut pengertian dari Ossip K. dalam Sumarno, ilmu politik adalah ilmu sosial yang mempelajari sifat dan tujuan dari suatu negara, dimana terdapat organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan yang tidak resmi, yang dapat mempengaruhi negara (Sumarno, 1989 : 8). Hal ini berarti benar bahwa politik bisa dikatakan sebagai pihak yang berkuasa untuk Negara. Berkuasa untuk

Negara khususnya untuk masyarakat adalah dalam melakukan segala kebijakan-kebijakannya.

Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi. Demokrasi itu sendiri, kekuasaan ada ditangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sepertinya hal itu kurang berfungsi di Indonesia sebagai Negara demokrasi. Karena ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah tidak mengarah pada kepentingan rakyat dan Negara, maka seharusnya masyarakat bisa mencabut kekuasaan tersebut. Tetapi mungkin karena penguasa-penguasa politik di Indonesia terlalu berkuasa di Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga jika penguasa-penguasa politik yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak untuk kepentingan rakyat, tetap duduk diposisi kekuasaannya. Inilah perlunya opini publik dalam masyarakat Indonesia. Karena dari opini public, pemerintah bisa mengevaluasi bagaimana kinerjanya selama ini, apakah rakyat sudah sejahtera atau belum.

Seperti halnya komunikasi, politik adalah proses, dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan. Menurut apa yang disebutkan oleh Zulkarmein Nasution, bahwasanya politik bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar symbol. Ilmuwan politik Mark Roedolf mengatakan dengan

cara sederhana, "Politik adalah pembicaraan, atau lebih tepat, kegiatan politik adalah berbicara" (Nimmo, 2000 : 8). Jika politik merupakan pembicaraan, maka komunikasi politik adalah pembicaraan yang terjadi di dunia politik. Seperti yang disebutkan oleh Fagen dalam Nasution yaitu komunikasi politik adalah segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Dimana mempunyai cakupan didalamnya. Cakupan tersebut meliputi studi mengenai jaringan komunikasi, baik komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, media massa dan saluran-saluran khusus, serta terdapat determinasi sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud (Nasution, 1990:24).

Dengan pengertian-pengertian diatas, maka untuk lebih memahami apa itu opini publik, akan lebih mudah seperti yang dijelaskan Fagen dalam Nasution diatas, yang dimaksud dengan segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik adalah segala pembicaraan tentang politik dan ruang lingkupnya. Sehingga dapat dikatakan penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator terhadap komunikan. Pesan-pesan politik tersebut yang dimaksud dengan opini publik. Sedangkan komunikator dan komunikan disini berlangsung tidak tetap, dimana posisi komunikan, setelah ada *feedback*, dan kemudian komunikan memulai pembicaraan berikutnya, maka saat itu pula ia berubah perannya menjadi komunikator dan yang tadinya

sebagai komunikator, berubah menjadi komunikan. Komunikan dan komunikator disini adalah sebagai publik politik.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa opini publik merupakan pesan-pesan tentang politik, dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan. Menurut Dan Nimmo yang mengutip dari Gibb, opini publik adalah kumpulan pendapat orang mengenai hal ihwal yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas (Nimmo, 2004:10). Yang dimaksud dengan hal ihwal yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas adalah segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik atau rakyat. Hal yang berkaitan dengan kepentingan publik tersebut tentunya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah untuk rakyat. Sebenarnya opini publik bisa dikatakan sebagai pernyataan dari pembicara. Karena jika kita mengomentari sebuah kasus yang ditunjukan pada sasaran, itu sama saja dengan kita melontarkan opini. Sedangkan kebijakan atau yang disebut sebagai *beleid* atau *police*, dapat diartikan seruntunan siasat dan pertimbangan penuh kebijaksanaan yang sudah difikirkan secara hati-hati dan berdasarkan musyawarah bersama untuk menyelesaikan permasalahan sosial politik ditengah masyarakat, khususnya bersangkutan dengan ketatanegaraan (Kartono, 1996:136).

Seseorang yang sedang mengeluarkan opini bisa dilihat dari komunikasi verbal dan nonverbalnya. Lain dengan sikan

Kita dapat mengatakan bahwa diam adalah sikap, tetapi diam tidak bisa kita menginderakan, dalam hal ini adalah melihat, mendengar, atau merasakan diam secara utuh dan masih ada dalam diri seseorang. Seperti yang diambil dari Nurudin (2002:52), bahwasannya dalam ilmu psikologi opini adalah ekspresi sikap. Jadi opini dapat dikatakan sebuah aktualisasi dari sikap. Dalam hal ini sikap masih berada dalam diri seseorang dan belum dimunculkan, sedangkan opini sudah dimunculkan. Kita akan bisa mengindera opini, ketika opini tersebut sudah dibuktikan atau diekspresikan. Dalam hal ini, Nimmo, menjelaskan bahwa opini publik juga bisa disebut sebagai cara singkat untuk menggambarkan kepercayaan atau keyakinan yang berlaku di masyarakat tertentu, bahwa hukum-hukum tertentu bermanfaat (Eugene E. Dalam Nimmo, 2004:10).

Hukum-hukum tersebut bermanfaat dalam hal ini adalah karena sesuai dengan kepentingan masyarakat tersebut. Adapun Stogdill dalam Nimmo, menyebut opini publik sebagai suatu gejala dari proses kelompok (Nimmo, 2004:10). Dimana gejala dari proses kelompok tersebut merupakan proses komunikasi politik dalam penyampaian pesan-pesan politik. John W. Fox dalam Nimmo berpendapat opini publik merupakan opini pribadi orang-orang tentang pemerintah yang dianggap bijaksana untuk diindahkan atau diperhatikan (Nimmo, 2004:10). Pendapat John

W Fox ini adalah menjelaskan bahwasannya opini-opini pribadi dari orang-orang tentang pemerintah dan kebijakannya, adalah patut untuk diperhatikan dan diindahkan. Karena itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah dalam menjalani kinerjanya. Karena opini pribadi tersebut adalah kumpulan dari opini orang-orang, maka disebut dengan opini publik.

Pada dasarnya jika kita menyebut apa itu opini yaitu sama dengan pendapat. Karena opini berkaitan dengan hasil pemikiran seseorang yang diungkapkan kepada orang lain atau orang banyak tentang sesuatu hal yang menarik. Sama halnya dengan pendapat. Jadi opini publik juga bisa disebut sebagai pendapat publik, dimana publik dalam hal ini adalah orang banyak atau masyarakat. Seperti yang dikutip dari Kartini Kartono dalam buku Pendidikan Politik (1996:37), bahwasannya opini publik dapat disamakan dengan pendapat umum.

Opini publik dapat terjadi bila publik mempunyai ketertarikan terhadap suatu isu yang menarik perhatiannya. Dalam hal ini Kartini Kartono menjelaskan bahwa Opini publik dapat diyakini sebagai produk kekuatan-kekuatan sosial tertentu, dimana produk kekuatan-kekuatan sosial tersebut mempunyai interest tersendiri dengan intensi atau maksud khusus (Kartono, 1996:132). Dalam hal ini yang dimaksud dengan produk

kekuatan-kekuatan sosial tertentu, adalah hasil dari pemikiran masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menarik perhatiannya. Ketertarikannya tersebut dikarenakan adanya maksud tertentu dimana kebijakan pemerintah tersebut menyangkut kepentingan dirinya.

Dalam penelitian ini kebijakan yang diambil adalah kebijakan SBY JK tentang pemberantasan korupsi. Dalam benak aktivis politik, kebijakan pemerintah tentang pemberantasan korupsi ini menarik untuk dibicarakan. Karena aktivis politik merupakan seseorang yang aktif ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti berdiskusi-diskusi masalah politik. Sedangkan korupsi itu sendiri menyangkut kepentingan negara Indonesia, dimana telah merugikan masyarakat Indonesia karena hak mereka telah dirampas oleh koruptor-koruptor tersebut.

Dalam dunia politik akan mati jika didalamnya tidak terdapat apa yang disebut dengan komunikasi politik. Sehingga dapat dikatakan tidak mungkin jika dalam politik tidak melakukan komunikasi. Di dalam komunikasi, tentunya kita mengenal istilah *feedback*. *Feedback* tersebut akan terus berjalan bila komunikasi politik itu berjalan dengan efektif. Sampai pada akhirnya dalam komunikasi politik tersebut ada yang disebut dengan opini publik. Tentu saja opini publik mempunyai fungsi yang penting dalam proses politik. Dalam hal ini Kartini Kartono dalam

Pendidikan Politik menyebut 4 fungsi opini publik dalam proses politik, yaitu :

1. Memberikan pengaruh pada penetapan keputusan dan kebijakan atau pemerintah
2. Dipakai sebagai sarana untuk proses sosialisasi politik bagi rakyat dan pemberian informasi kepada pemerintah
3. Merupakan ekspresi dari harapan, aspirasi dan tuntutan golongan-golongan tertentu untuk dipenuhi oleh pemerintah
4. Pengesahan atau legitimasi terhadap perilaku politik (Kartono, 1996:133).

Keempat fungsi inilah yang kemudian dijadikan pedoman bahwa opini publik itu sangat berperan penting bagi politik, terutama dalam komunikasi politik.

Opini publik tentu saja berkaitan dengan kebijakan dan pemerintah. Kebijakan pemerintah, pelaksanaan kebijakan tersebut, dan hasil atau *output* dari kebijakan tersebut menentukan kredibilitas pemerintah dalam hal ini adalah yang membuat kebijakan tersebut. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa opini publik terhadap kebijakan dan pemerintah, menentukan kredibilitas pembuat kebijakan.

E.2. Kredibilitas

Kredibilitas Presiden dan wakilnya ditentukan dari bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bertindak sebagai *problem solving*, pembuat kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak dan bagaimana dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya

untuk orang lain. Dalam hal ini, pengertian kredibilitas akan membuat kita menjadi faham akan pentingnya penilaian orang lain terhadap diri kita, sebagai wujud untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita dalam melakukan sesuatu dimata orang lain.

Dalam hal ini para aktifis mengemukakan pendapatnya, dimana yang menarik perhatian mereka karena berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dengan adanya korupsi di Indonesia yang telah membuat Indonesia mengalami kerugian yang besar, disamping itu hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor-koruptor tersebut, sehingga masyarakat Indonesia menjadi semakin tidak sejahtera. Maka dengan ini peneliti yakin bahwa para aktifis tertarik untuk membicarakan hal-hal terutama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani kesejahteraan rakyat. Hal itu karena aktifis politik adalah orang-orang yang aktif di dunia politik dan tertarik untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan teori Kredibilitas, bahwasannya menurut Jalaludin Rakhmat Kredibilitas adalah hasil penilaian orang lain tentang diri kita, setelah mereka menerima informasi tentang kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam membangun kredibilitas yang ada pada diri kita, maka kita perlu mengetahui bagaimana orang lain menilai kita. Dalam hal ini karena kredibilitas tidak selalu inheren berada dalam diri kita, artinya tidak selalu melekat

pada diri kita. (Rakhmat, 2000:76). Ada dua hal yang terkandung didalam kredibilitas. Pertama, kita bisa menyebut kredibilitas adalah persepsi komunikate, dalam hal ini adalah tidak *inheren* dalam diri komunikator. Tidak inheren yakni sesuatu tentang diri kita yang tidak melekat dalam diri kita. Dalam arti, kita bisa membangun kredibilitas tersebut dengan kemampuan yang kita miliki, untuk menciptakan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Kemudian yang kedua, kredibilitas berhubungan dengan sifat-sifat komunikator, dimana sifat-sifat komunikator yaitu sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Dalam hal ini seperti sifat arogan, sifat penyayang, dan sebagainya yang mana sifat-sifat tersebut adalah melekat pada diri kita. Sesuatu yang kita bangun untuk mendapatkan kredibilitas serta sifat-sifat komunikator selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas (Rakhmat, 2005:257). SBY-JK dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai presiden dan wakil presiden pada dasarnya adalah tidak *inheren* atau melekat secara utuh dalam diri SBY dan JK. Dalam hal ini karena yang dinilai adalah bagaimana cara atau tindakan SBY-JK dalam melakukan kebijakan pemberantasan korupsi. Sedangkan untuk menilai sifat-sifat yang melekat pada SBY-JK dalam melakukan kebijakan pemberantasan korupsi yaitu dengan sifat-sifat SBY-JK yang mendorongnya untuk melakukan cara tersebut. Untuk mengetahui semua itu, kita dapat melihatnya dengan komponen-komponen kredibilitas yang ada pada komunikator yang

berkaitan dengan cara SBY-JK melakukan kebijakan tersebut. Disini kita akan membahas bagaimana kredibilitas SBY-JK tentang kebijakannya dalam pemberantasan korupsi dimata aktifis politik.

Dari pengertian diatas, kredibilitas SBY-JK yaitu hasil penilaian para aktifis politik pada SBY dan JK dalam melakukan kebijakan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini para aktifis politik telah melihat hasil dari kebijakan tersebut dari berbagai media selama masa jabatan pemerintahan SBY-JK. Kredibilitas SBY-JK dibangun berdasarkan apa yang SBY dan JK sendiri lakukan baik berkaitan dengan kebijakannya ataupun bukan. Tetapi jika aktifis politik menilai tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan SBY-JK, tentu saja itu berkaitan dengan bagaimana cara yang dilakukan SBY-JK dalam melakukan kebijakan pemberantasan korupsi tersebut.

Menurut Andersen, (1972 : 82), dalam Rakhmat, *prior ethos* adalah hal-hal yang mempengaruhi persepsi komunikate tentang komunikator, sebelum ia berlakukan komunikasinya (Rakhmat, 2005 : 258). Lain halnya dengan *intrinsic ethos*. Jika seseorang dianggap oleh audience tidak memiliki *prior ethos*, maka setelah orang tersebut memperlihatkan keahliannya, audience akan memiliki kagum, sehingga orang tersebut memiliki *intrinsic ethos*. Kenneth E. Andersen, dalam Rakhmat menjelaskan tentang *intrinsic ethos*, yaitu dibentuk oleh topik yang dipilih, cara penyampaian, teknik-teknik

pengembangan pokok bahasan, dan bahasa yang dipergunakan, serta organisasi pesan atau sistematika yang dipakai (Rakhmat, 2005 : 259).

Dalam hal ini sebenarnya SBY-JK sudah memiliki apa yang disebut dengan *prior ethos*, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden. Adanya *prior ethos* tersebut diperkuat dengan kebijakan SBY-JK tentang pemberantasan korupsi, hal ini menjadikan masyarakat suka dengan SBY-JK. Tetapi seiring berjalannya waktu, ditambah lagi karena beberapa faktor baik dari segi bencana alam, maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan SBY-JK sendiri termasuk pemberantasan korupsi, maka *prior ethos* tersebut sepertinya hilang. Seharusnya jika SBY-JK yang telah mempunyai *prior ethos*, ditambah lagi dia mendapatkan apa yang disebut dengan *intrinsic ethos*, maka kredibilitas SBY-JK semakin bagus dimata masyarakat, karena SBY-JK telah menunjukkan keberhasilan dari keahlian yang mereka punya. Tetapi pada kenyataannya keahlian itu tidak berhasil diwujudkan dalam bentuk *riil* yang semata-mata untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.

Orang lain dalam menilai kita, tidak selalu hanya memandang dari sifat-sifat yang kita miliki, tetapi juga dari segi peran dan kedudukan kita dimata orang lain. Demikian pula jika kita kaitkan dengan kredibilitas SBY-JK, bahwasannya kredibilitas SBY dan JK tidak hanya ditentukan dari sifat-sifat yang melekat pada SBY dan JK, tetapi juga peran dan kedudukannya sebagai Presiden dan Wakil

Preiden RI. Jika diakitkan dengan kredibilitasnya dalam membuat kebijakan maka dapat dilihat dari bagaimana cara SBY dan JK dalam membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut, kemudian *output* dari kebijakan tersebut.

Glenn R. Capp dan G. Richard Capp, Jr., dalam *Basic Oral Communication* dalam Rakhmat menjelaskan lima cara bagaimana anda dinilai orang lain. Kelima cara tersebut adalah:

1. Anda dinilai antara lain dari reputasi yang mendahului anda
2. Anda dinilai antara lain dari perkenalan tentang anda
3. Anda dinilai antara lain dari apa yang anda ucapkan
4. Anda dinilai antara lain dari cara anda berkomunikasi
5. Anda dinilai antara lain dari pernyataan-pernyataan yang menyatakan *ethos* (kesan yang baik mengenai anda) (Rakhmat 2000:76-77).

Kelima cara bagaimana kita dinilai orang lain ini juga menentukan bagaimana masyarakat menilai kredibilitas SBY-JK tentang kebijakan-kebijakannya. Misalnya, dilihat dari reputasi awal SBY JK dalam menyerukan pada masyarakat tentang kebijakan pemberantasan korupsi, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan untuk melakukan kebijakan tersebut, kesesuaian antara apa yang diucapkannya dengan tindakannya dalam melaksanakan kebijakan tersebut, bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak yang berperan dalam kebijakan tersebut, kemudian hasil *output* dari kebijakan tersebut

Kredibilitas dapat dibentuk atau dibangun. Kita dapat membangun kredibilitas dari informasi orang lain tentang dia, dari sahabat, media massa, atau sumber-sumber yang dapat dipercaya, juga dari pengamatan langsung terhadap komunikator (Rakhmat, 2000:72). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kredibilitas sama dengan persepsi khalayak tentang komunikator, karena kredibilitas tidak melekat pada diri pembicara, tetapi terletak pada persepsi khalayak tentang pembicara. Seperti contoh yang dikutip dalam buku "Retorika Modern", karangan Jalaluddin Rakhmat, bahwasanya, "Seorang profesor senior sangat dihormati di fakultasnya, tetapi tidak dikenal di lingkungan pedagang di pasar. Seorang mubalig dielukan para pengagumnya, tetapi dibenci oleh orang-orang yang memusuhinya" (Rakhmat, 2000:72).

Para pakar komunikasi menyebut kredibilitas adalah sama dengan apa yang disebut *ethos* oleh Aristoteles. Seperti contoh yang diambil dalam buku karangan Jalaluddin Rakhmat, yaitu :

Sekali waktu, dalam laporan pembangunan di TVRI, Anda mendengar seorang pejabat membuat lelucon. Tidak lucu, tetapi anda mendengar gemuruh tertawa dari orang-orang disekitarnya. Bisa jadi lelucon itu betul-betul tidak lucu, tetapi orang tertawa juga. Mengapa? Karena pejabat itu memiliki kredibilitas dan anda tidak (Rakhmat, 2000:71).

Rakhmat dalam buku Psikologi Komunikasi, mengatakan bahwa Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikate tentang sifat sifat komunikator. Dalam definisi ini ada dua hal yang

terkandung didalamnya. *Pertama*, kredibilitas adalah persepsi komunikate, dalam hal ini adalah tidak *inheren* dalam diri komunikator. *Kedua*, kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas (Rakhmat, 2005:257).

Dalam buku Rakhmat ini disebutkan bahwa kredibilitas itu adalah masalah persepsi, dimana kredibilitas berubah tergantung pada pelaku persepsi (komunikate), topik yang dibahas, dan situasi. Sehingga dapat diartikan bahwa, jika kita mempunyai kredibilitas di hadapan teman-teman kita, belum tentu kita mempunyai kredibilitas di hadapan orang lain.

Menurut Andersen, (1972 : 82), dalam Rakhmat, *prior ethos* adalah hal-hal yang mempengaruhi persepsi komunikate tentang komunikator, sebelum ia berlakukan komunikasinya (Rakhmat, 2005 : 258).

Prior ethos, dapat diperoleh dari berbagai hal, baik dari pengalaman langsung dengan komunikator (misalnya, karena sudah lama bergaul dengan komunikator, sehingga sudah mengenal kepribadian dari komunikator), atau dari pengalaman wakilan, atau yang disebut dengan *vicarious experiences* (karena sudah sering melihat dan mendengarkan di media massa). Dalam hal ini terdapat efek media massa dalam memberikan efek. *Prior ethos* komunikator bisa dihubungkan dengan kerangka rujukan dari orang tersebut dan

kita menempatkan pada skema kognitif kita. Contohnya, anda bisa mempercayai kata-kata seseorang tentang penyakit anda, karena orang tersebut adalah dokter. Selain itu *prior ethos* juga bisa terbentuk karena sponsor, atau pihak-pihak yang mendukung komunikator. Contohnya, ketika dosen kita memperkenalkan seseorang pada kita, bahwa ia adalah seorang yang ahli komputer, maka kita akan mempersepsikan orang tersebut adalah sebagai orang yang ahli dalam bidang komputer. Inilah yang disebut dengan *sponsorship and endorsement*, sehingga *prior ethos* juga bisa terbentuk dari petunjuk-petunjuk non verbal yang ada dalam diri komunikator (Rakhmat, 2005 : 258).

Jika seseorang dianggap oleh audience tidak memiliki *prior ethos*, maka setelah orang tersebut memperlihatkan keahliannya, audience akan memiliki kagum, sehingga orang tersebut memiliki *intrinsic ethos*. Kenneth E. Andersen, dalam Rakhmat menjelaskan tentang *intrinsic ethos*, yaitu dibentuk oleh topik yang dipilih, cara penyampaian, teknik-teknik pengembangan pokok bahasan, dan bahasa yang dipergunakan, serta organisasi pesan atau sistematika yang dipakai (Rakhmat, 2005 : 259).

Penelitian tentang kredibilitas hampir selalu berkenaan dengan *prior ethos*. Sesuai yang disebutkan oleh Kelman dan Hovland (1974 : 138-149) dalam Rakhmat yang memutar kaset didepan objek eksperimen. Berikut penelitiannya :

"Pada suatu kelompok dikatakan bahwa pembicara adalah hakim yang banyak menulis masalah kenakalan remaja (kredibilitas tinggi), dan pada kelompok lain dilukiskan pembicara sebagai pengedar narkotik (kredibilitas rendah), keduanya berbicara tentang perlunya perlakuan yang lebih ringan terhadap remaja-remaja yang nakal. Segera setelah komunikasi, sikap subjek diukur. Hasilnya menunjukkan bahwa subjek cenderung lebih setuju pada komunikator yang berkredibilitas tinggi (Rakhmat, 2005 : 259).

EM Griffin, dalam buku *Communication Theory* edisi ke lima, menjelaskan bahwa Aristoteles menjelaskan pengertian retorika yang diartikan kedalam bahasa Indonesia, bahwasanya retorika adalah, seni yang mengarah pada wacana untuk membuat kebenaran yang menyerupai kemungkinan yang lebih besar untuk menjadikan *audience* tidak diberi keyakinan secara lengkap (Griffin, 2003 : 304). Jadi lebih mengarah pada pembuktian secara nyata pada *audience*, sehingga komunikator tidak perlu menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan dirinya.

Bukti dari retorika yang dijelaskan Aristoteles adalah adalah *logos (logical)*, *ethos (ethical)*, dan *pathos (emotional)* (Griffin, 2003 : 304). Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, retorika bisa dilihat dari unsur logika, etika, dan emosi. *Pertama*, secara logika, retorika dapat dibuktikan dengan pendapat tentang perasaan, yaitu dengan *enthymeme and the example* (Antimum dan contohya). Antimum hanya merupakan versi yang melengkapi silogisme deduktif yang formal. Sedangkan contohya adalah ada seorang raja yang

Premis (kalimat) mayor : "Semua orang diciptakan sama"

Premis (kalimat) minor : "Saya adalah seseorang"

Kesimpulan : "Saya sama dengan orang lain"

Dengan demikian, *enthymeme* atau Antimum digunakan sebagai *deductif logic*, yang bergerak dari prinsip yang lebih luas, pada kebenaran yang lebih spesifik atau sempit.

Kedua, adalah etika. Etika, dapat diamati pada kredibilitas sumber. Untuk membangun kredibilitas sumber menurut Aristoteles terdapat tiga komponen kualitas, yaitu :

- a) *Intelligence*, dalam hal ini adalah dilihat dari bagaimana kualitas kecedasan, kepandaian, dan keahlian dari komunikator
- b) *Virtuous Character*, yaitu watak, atau akhlak yang baik
- c) *Good Will*, yaitu maksud yang baik, atau komitmen yang baik yang ditujukan untuk kepentingan khalayak.

Ketiga, adalah bukti dari emosinya. Yaitu dengan melihat bagaimana kestabilan emosi komunikator, dalam menghadapi emosi khalayak (Griffin, 2003 : 305,307,308). Dari pengertian tersebut maka kredibilitas, bisa ditentukan dari sifat-sifat yang melekat didalam diri kita, tetapi tidak semata-mata itu saja, karena dapat ditentukan dari bagaimana cara kita membangun kredibilitas kita sendiri

Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Retorika Modern*, menyebutkan Istilah-istilah dalam komunikasi. Ada tiga Istilah kredibilitas dalam komunikasi, yaitu :

1. Kredibilitas awal (*initial credibility*), yakni ketika orang menganggapnya tidak memiliki hak untuk berbicara di depan umum.
2. Kredibilitas yang timbul selama pembicara berpidato (*derived credibility*), yakni ketika orang mulai membahas masalah-masalah dengan sangat terinci, dan semua orang yang melihat mengaggumi kemampuannya.
3. Kredibilitas Akhir (*terminal credibility*), yakni ketika semua orang sadar bahwa orang yang tadinya dianggap tidak mempunyai hak untuk berbicara di depan umum, ternyata orang tersebut patut diakui kemampuannya (Rakhmat, 2000:72).

Istilah-istilah kredibilitas dalam hal ini merupakan hal yang tidak secara inheren melekat pada diri kita. Karena dari Istilah kredibilitas tersebut adalah kita sendiri yang menentukan kredibilitas kita dimata orang lain, dan kemudian orang lain tersebut menilainya.

E.2.1. Komponen-Komponen dalam Membangun Kredibilitas

Seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan untuk mengetahui kredibilitas seseorang, dapat dinilai dari komponen-komponen kredibilitas yang ada di dalamnya. Dalam buku Psikologi Komunikasi karangan Jalaluddin Rakhmat, Aristoteles menyebut karakter komunikator yang disebut dengan *ethos*. Karakter komunikator

kredibilitas komunikator. Komponen-komponen tersebut menurut Aristoteles, adalah *good sense, good moral character, dan good will*. Komponen-komponen kredibilitas yang lain, disebutkan oleh Hovland dan Weiss, yaitu *Expertise* (keahlian) dan *trustworthiness* (dapat dipercaya). Lain halnya dengan McCroskey (1968), yang menyebut *ekpertness* atau *expertise*, adalah *authoritativeness*. Sedangkan Markham (1968), menyebut sebagai faktor *reliablelogical*. Berlo, Lemert, dan Mertz (1966), menyebutnya, *qualification*. *Trustworthiness*, peneliti lain menggunakan istilah *safety, character, atau evaluative factor*. Dalam hal ini yang dibahas hanyalah kredibilitas yang mempengaruhi efektifitas sumber (Rakhmat, 2005 : 255-256). Komponen kredibilitas tersebut dapat dijadikan ukuran bagaimana penilaian kredibilitas kita dimata orang lain. Karena apa yang disebutkan oleh publik dalam hal ini adalah aktifis politik, berdasarkan komponen-komponen kredibilitas yang berkaitan dengan bagaimana cara yang dilakukan SBY-JK dalam memberantas korupsi, merupakan hasil dari penilaian aktifis politik untuk menentukan kredibilitas SBY-JK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Untuk lebih memahami bagaimana penilaian aktifis politik terhadap kredibilitas SBY-JK dalam memberantas korupsi, kita harus lebih memahami apa saja komponen-komponen dari kredibilitas tersebut.

Dalam hal ini Koehler, Annatoln dan Applbaum (1978:144-

147) menyebutkan empat komponen kredibilitas, yaitu :

1. Dinamisme, yaitu cara berkomunikasi
2. Sosiabilitas, yaitu kesan komunikate tentang komunikator sebagai orang yang periang dan senang bergaul
3. Kooreientasi, yaitu kesan komunikate tentang komunikator sebagai orang yang mewakili kelompok yang kita senangi, yang mewakili sistem nilai yang ada dalam diri kita
4. Karisma, yaitu digunakan untuk menunjukkan sifat yang luar biasa yang dimiliki komunikator, yang menarik dan mengendalikan komunikate seperti magnet, yang menarik benda di sekitarnya (Rakhmat, 2005 : 260-261).

Untuk lebih lengkapnya, kita dapat melihat komponen-komponen yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rakhmat. Dalam hal ini Rakhmat menambahkan apa yang disebutkan Koehler, Annatoln dan Applbaum diatas, bahwasannya komponen-komponen kredibilitas bisa dilihat dari segi :

1. Otoritas (Kekuasaan)

Otoritas atau *authority* merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam membangun kredibilitas. Otoritas dibentuk karena faktor latar belakang keluarga, keahlian, pendidikan, dan pengalaman. Contoh, cendekiawan islam yang dididik di Amerika, dianggap tidak memiliki otoritas untuk memberikan ceramah tentang Islam, dibandingkan dengan sarjana yang dididik di Mesir. Mereka sama-sama memiliki keahlian, tetapi tidak memiliki otoritas

2. *Good Sense* (perasaan yang baik)

Good Sense, ditunjukkan dengan melihat bagaimana perasaan komunikator terhadap khalayak. Apakah bisa dikatakan memiliki rasa peduli, simpati, dan empati, sebagai bukti bahwa komunikator memiliki perasaan yang baik terhadap komunika.

3. *Good Character* (akhlak yang baik)

Good character erat kaitanya dengan *good sense*, yaitu akhlak yang baik. Yang termasuk akhlak yang baik adalah, kejujuran, integritas kepribadiannya, dan ketulusan. Tokoh yang terkenal jujur, yang tidak mudah dibeli, yang telah berbuat banyak untuk masyarakatnya, akan disukai oleh khalayak. Jadi, ketika kita berbicara, kita bukan hanya menyampaikan apa yang kita ketahui (*what you know*), tetapi juga seluruh kepribadian kita (*what you are*). Seperti kata Seneca dalam Rakhmat menyebutkan bahwa, “*What ever the man is , such is the speaker*”. Oleh karena itu, *good character* dibentuk melalui proses yang lama sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri.

4. *Good Will* (komitmen yang bagus atau maksud yang baik)

Good Will disebut juga dengan komitmen yang mementingkan kepentingan umum atau bisa juga dikatakan sebagai maksud yang baik. *Good Will* terbentuk bila kita berbicara didepan umum semata-mata untuk kepentingan mereka, dan kita “berjuang” untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka, maka pendengar akan

tertarik kepada kita. Sehingga, apa yang kita bicarakan adalah bukan “kepada” (*speak to*) mereka, tetapi berbicara “bersama” (*speak with*) mereka.

Good will dapat dibangun dengan dua cara, yaitu melalui proses ko-orientasi. Yakni mencari kesamaan antara anda dengan khalayak dalam perbuatan, sikap, dan nilai. Ciptakan kesan kepada mereka bahwa keperluan mereka adalah keperluan anda, kerugian mereka adalah kerugian anda, dan kecemasan mereka adalah kecemasan anda juga. Anda harus bisa menyatukan anda secara psikologis dengan seluruh khalayak anda. Yang kedua, dengan menunjukkan keterlibatan pribadi atau (komitmen) anda kepada topik dan kebutuhan khalayak. Anda tegaskan bahwa “misi” anda terletak dalam keberhasilan anda menyampaikan topik itu.

5. Dinamisme (cara berkomunikasi)

Dinamisme dapat juga diartikan bagaimana cara berkomunikasi yang dilakukan komunikator. Dinamisme merupakan ekspresi fisik dari komitmen psikologis anda terhadap topik. Bila anda memandang serius pembicaraan anda, suara dan gerak anda juga terlihat serius dan anda semangat berbicara maka pendengar juga akan mendengarkan dengan serius dan semangat. (Rakhmat, 2000:72-73).

Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Jalaluddin Rakhmat hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh EM Griffin. Em

Griffin berpedoman pada pengertian dari Aristoteles seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk membangun kredibilitas sumber terdapat tiga komponen kualitas, yaitu :

- a. *Intelligence*, dalam hal ini adalah dilihat dari bagaimana kualitas kecedasan, kepandaian, dan keahlian dari komunikator
- b. *Virtuous Character*, yaitu watak, atau akhlak yang baik
- c. *Good Will*, yaitu maksud yang baik, atau komitmen yang baik yang ditujukan untuk kepentingan khalayak (Griffin, 2003 : 307).

Dari berbagai komponen kredibilitas diatas, maka peneliti menggunakan komponen-komponen kredibilitas tersebut yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun komponen-komponen kredibilitas yang digunakan adalah :

- a. *Otoritas* (kekuasaan)
- b. *Expertise* (keahlian)
- c. *Trustworthiness* (kepercayaan)
- d. *Good Will* (Komitmen/ maksud yang baik) (Rakhmat, 2005 : 255-256, Rakhmat, 2000:72-73).

Pembahasan komponen-komponen kredibilitas tersebut kaitannya dengan masalah yang diteliti akan dibahas pada Bab III. Berdasarkan kebijakan yang diambil adalah masalah pemberantasan korupsi, maka kita perlu mengerti pengertian dari korupsi.

E. 3. Korupsi

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang merugikan banyak

nihak. Sudah senantiasnya para koruptor itu diadili seadil-adilnya sampai

pada *akar-akarnya*. Karena tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak bermoral dan kejam. Sehingga sudah sepantasnyalah Presiden membuat dan melakukan kebijakan pemberantasan korupsi, seperti yang dilakukan SBY-JK. Dimana usaha yang dilakukan SBY-JK cukup membuahkan hasil dalam menangani kasus-kasus korupsi dari bawah sampai pada tingkat DPR RI. Sayangnya SBY-JK belum berani untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang nilainya triliun. Tetapi setidaknya untuk pengungkapan korupsi BLBI sudah berani mengungkapnya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dikmklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey

Transparency International Indonesia (TII), yang diambil dari Evi Hartanti (2007:2), merupakan Indonesia merupakan Negara paling Korup nomer enam dari 133 negara. Di Asia Tenggara, ada dua Negara yang lebih korup dibandingkan dengan Indonesia yaitu Bangladesh dan Myanmar. Jika dilihat dari Nilai Indeks Persepsi Korupsi atau yang disebut dengan IPK, Indonesia ternyata lebih rendah dari pada Negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, Negara-negara yang mempunyai IPK lebih buruk dari Indonesia, adalah yang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti. Sebagai Negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh *Transparency International Indonesia* tersebut yang berbasis di Berlin, Jerman IPK RI sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada diangka rendah yakni 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan demikian Indonesia masuk rangking 122 dari 133 negara yang disurvei. Peringkat tersebut disebabkan oleh adanya korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sector paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu kecenderungan pemerintah memberikan suap paling banyak adalah di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan property.

Diera Reformasi selama lima tahun sekarang tidak ada upaya
memberantasan korupsi yang efektif. Hal ini merupakan sangat ironis

mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN. Dengan demikian menunjukkan adanya pemerintah yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi. Padahal koruptor-koruptor tersebut adalah yang menyebabkan Indonesia berada dirangking 122 dari 133 negara. Hal itu membuat Indonesia tidak dipandang oleh negara lain. Lalu sampai kapan Indonesia akan menduduki peringkat terbawah? Hal inilah yang menjadi Pekerjaan Rumah untuk pemerintah sekarang ini, dan pemerintah selanjutnya. Yang jelas untuk membangun negeri ini, kita harus tegas terhadap hukum terlebih dahulu dan memperbaiki moral bangsa terlebih dahulu. Apabila masyarakat sudah mematuhi peraturan-peraturan pada hukum tersebut, dan segala moral masyarakat sudah baik, maka untuk menindak ke hal-hal berikutnya, akan lebih terarah. Dalam hal ini karena koruptor adalah penjahat, seharusnya koruptor tersebut harus ditindak tegas dengan penegakkan hukum di Indonesia seperti yang telah disebutkan dalam UU RI tahun 1999.

Penjelasan UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (UU No. 31 Tahun 1999).

Korupsi sebenarnya bukan merupakan suatu budaya Indonesia.

Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan oleh pejabat serta oknum-oknum tertentu dimana hal itu telah merugikan banyak pihak termasuk Negara dan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Ensiklopedia Indonesia yang diambil dari Evi Hartanti (2007:8), korupsi diambil dari bahasa latin, yaitu corruption yaitu penyuapan, dan corruptore yaitu merusak). Dengan kata lain gejala dimana pejabat atau badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah, korupsi tersebut dapat berupa :

1. Kejahatan atau kebusukan, dapat diartikan juga tidak bermoral, atau dapat disuap, dapat juga diartikan sebagai kejahatan dan ketidakjujuran. Sebenarnya korupsi adalah perbuatan jahat yang tidak bermoral, untuk kepentingan sendiri yang merugikan banyak pihak. (Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*).
2. Bisa juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976).
3. Pengertian dari Korup, Korupsi, dan koruptor, adalah sebagai berikut :

- a) Korup adalah busuk; suka menerima uang suap atau uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya:

- b) Korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
- c) Koruptor adalah orang yang korupsi (Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*).

Jadi secara harfiah, korupsi bisa dikatakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dalam hal ini sebenarnya arti korupsi itu sangat luas. Karena bisa karena bisa bentuk penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Bisa juga diartikan sebagai hal yang busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Koruptor merupakan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan pengertian dari korupsi itu sendiri yaitu dijelaskan dalam UU RI tahun 1999, yaitu korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam penjabarannya

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. No 31 Tahun 1999).

Dari pengertian diatas maka jelaslah jika korupsi harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi dalam hal ini, para aktifis berpendapat bahwa SBY dan JK kurang berani untuk menindak tegas para pelaku korupsi atau yang disebut dengan koruptor. Ketidak tegasan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku-pelaku korupsi, masyarakat dan Negara. Bagi koruptor tentu saja tidak adil, karena tidak semua koruptor diadili. Dalam hal ini prioritas SBY-JK justru pada koruptor-koruptor yang nilainya kecil terlebih dahulu, dan akhirnya mengesampingkan koruptor-koruptor yang nilainya besar yang justru berpengaruh pada kerugian negara.

Maka jelaslah bahwa korupsi kaitannya adalah dengan sektor *financial*. Hal ini dapat dilihat dari adanya masalah sarana, kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, yang disusun oleh KPK berikut ini :

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana

penjara karena korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa yang terkait dengan korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan segala bentuk penyimpangan moral, yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi, yang dapat merugikan negara dan semua pihak yang berhak menerima keuntungan. Di bawah ini akan dijelaskan kelompok dari ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan menjadi 7, yaitu;

Ketigapuluh bentuk /jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (pemberian uang, barang, Rabat (discount), komisi, dan lain-lain) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Dengan demikian korupsi dapat diklasifikasikan tidak hanya dari segi penggelapan, suap-menyuap, tetapi juga masalah benturan kepentingan dalam pengadaan serta Gratifikasi. Selain bentuk tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana korupsi itu adalah :

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Sesungguhnya dengan semakin banyaknya pihak-pihak baik pejabat negara ataupun lembaga-lembaga dan aparatur negara di Indonesia yang melakukan korupsi, maka hal itu menunjukkan bahwa moral bangsa Indonesia semakin buruk. Jika ingin membenahi bangsa Indonesia seutuhnya, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah moralnya. Untuk membenahi moral bangsa Indonesia yang terlebih dahulu harus dibenahi adalah moral dari pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan aparatur-aparatur negara, baru kemudian moral masyarakat. Karena jika moral pemerintahnya busuk, masyarakatnya juga ikut busuk dikemudian. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus pandai dan cerdas dalam menentukan siapa-siapa yang duduk sebagai

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pertimbangan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan topik penelitian, informasi yang diperlukan, persepsi tentang realitas dan ketersediaan bahan serta didasarkan pula pada prinsip-prinsip teoritis dan metodologis maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2002:6).

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melalui pengujian hipotesa. (Singarimbun, 1995:4). Menurut Whitney (1960) dalam Moh. Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu. Hal ini termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 1988:64).

1. Informan

Informan yang ditunjuk sebagai sumber data adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya. Hal tersebut dijelaskan oleh Nasution (1992:99) bahwa dalam pengumpulan data peneliti bergerak dari informan kunci ke informan pendukung dan terus berlanjut sehingga tercapai titik *redundancy*.

Teknik pengambilan informan yaitu cara-cara pengambilan sampling didalam penelitian. Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel akan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan. *Sampling purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu (Nasution, 2002 :86). *Sampling purposive* ini juga disebut sebagai sample bertujuan. Sample bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Beberapa pertimbangan biasanya sangat diperlukan dalam sample ini. Seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, yang akan mengakibatkan tidak dapatnya mengambil sample yang besar dan jauh. Walaupun peneliti dapat menentukan sample berdasarkan tujuan

tertentu, tetapi ada berbagai syarat yang harus dilakukan. Syarat tersebut adalah :

- a. Pengambilan sample harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sample benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. (Arikunto, 1996:127-128).

Dalam penelitian ini, informan ditentukan secara *purposive* atau bertujuan. Adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh nara sumber yang mampu memberikan data secara utuh. Informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aktifis politik, dengan ciri-ciri dibawah ini:

- a. Berumur lebih dari 20 tahun
- b. Aktif dalam politik, seperti aktif dalam Partai Politik maupun fraksi dari partai politik, dan organisasi-organisasi masyarakat yang berkaitan dengan politik.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Daerah

4. Unit Analisis Data

Aktifis Politik di DIY, yaitu perwakilan dari Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang berkaitan dengan Politik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara menurut Soetrisno Hadi, yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Hadi, 1997:224). Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara *in- depth* (mendalam), karena dalam wawancara dapat dicapai secara maksimal dan akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Menurut Michael Quinn Patton, wawancara mendalam yaitu meliputi menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya, dan kemudian menindak lanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait (Patton, 1991:182).

Menurut Sudjiono, wawancara yaitu segala kegiatan untuk menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan siapa saja yang diperlukan mengenai pendapat, kesan pribadi, dengan menggunakan instrument yaitu *interview guide*, *tape recorder*, dan memperoleh dan mempersiapkan proses wawancara

6. Validitas Data

Agar data yang diperoleh memiliki nilai keabsahan yang dapat dipercaya validitasnya maka dibutuhkan suatu teknik. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data merupakan usaha untuk mengecek data yang telah dikumpulkan (Nawawi dan Martini, 1994:188). Selain itu triangulasi data adalah upaya untuk mengecek kebenaran tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain (Nasution, 1992:15).

Denzin (1978) dalam Patton, menyebutkan empat tipe dasar triangulasi, yaitu ;

- a. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian. Contoh, mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda, atau dengan titik pandang yang berbeda;
- b. Triangulasi Investigator, yaitu penggunaan beberapa evaluator, atau ilmuan sosial yang berbeda;
- c. Triangulasi Teori, penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data;
- d. Triangulasi Metodologis, penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen (Patton, 1991:280).

Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Hal ini berarti membandingkan data pengamatan dengan data wawancara, artinya membandingkan apa yang dikatakan orang dimasyarakat dengan apa yang dikatakan sendiri. Bisa dikatakan membandingkan perspektif orang dengan sudut pandang yang

berbeda. Dalam hal ini dapat dicapai melalui wawancara dengan mengecek dokumen program dan bukti tertulis lainnya yang dapat membenarkan apa laporan wawancara responden (Patton, 1991:280).

Menurut Moleong, triangulasi merupakan sumber data untuk mengecek data yang telah dikemukakan. Selain itu triangulasi data adalah upaya untuk mengecek kebenarannya data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain.(Lexy J.Moleong 1990 :178). Menurut Patton (1987) triangulasi dengan menggunakan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2002:178). Cara tersebut dapat ditempuh dengan jalan membandingkan data hasil wawancara melalui satu sumber dan sumber lain yang berbeda statusnya. Cara tersebut juga dapat ditempuh dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.

Hasil yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian lalu dibandingkan dengan hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian. Tetapi karena dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan tidak mengamati, maka hasil yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan satu informan penelitian lalu dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan lainnya, berdasarkan ukuran dalam stratifikasi sosial atau pelapisan sosial

Melalui metode triangulasi data, dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian, sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber pertama masih ada kekurangan. Agar data yang diperoleh ini semakin dapat dipercaya, maka data yang diperoleh tidak hanya dari satu sumber saja tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. Teknik triangulasi data dalam penelitian digunakan karena akan meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang diperoleh (Moleong, 2002:179).

7. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh diseleksi dengan menggunakan kriteria relevansi dengan topik penelitian. Kemudian data disusun berdasarkan klasifikasi-klasifikasi yang telah ditentukan, selanjutnya data tersebut diinterpretasikan, sehingga dari interpretasi tersebut ditarik kesimpulan sesuai dengan data yang tersedia. Prof. Dr. Noeng Muhadjir dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 1989:171).

Analisis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan merupakan studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklsifikasi dan jumlahnya sedikit. Penelitian kualitatif lebih meningkatkan hubungan

antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Penekanan bukan pada hipotesis melainkan pada usaha menjawab

pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentasi